

Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo

The Effectiveness of Village Fund Allocation in Community Empowerment in Kacaribu Village, Kabanjahe District, Karo Regency

Ragil Kurniawan Keloko^{1*}, Asima Yanty S. Siahaan²

^{1,2}Departement of Public Administrastion, Universitas Sumatera Utara

*Korespondensi Penulis: Ragilkeloko9@gmail.com

Abstrak

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan fisik ataupun non fisik kepada desa. Alokasi Dana Desa (ADD) non fisik berupa pemberdayaan masyarakat yang tujuannya mensejahterahkan baik dari segi perekonomian ataupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada awalnya kurang sejahtera menjadi sejahtera dan dapat berkembang dalam sumber daya manusia. Desa Kacaribu mempunyai program pemberdayaan masyarakat yaitu program-program yang menggunakan Alokasi Dana Desa meliputi program-program yang telah direncanakan seperti Bantuan langsung kepada Balita dan lansia, kegiatan Gotong-Royong, Pelatihan Karang Taruna dan Pelatihan Adat-Istiadat di Desa Kacaribu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif,) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu belum efektif dilihat pencapaian tujuan yaitu transparansi dan sasaran kebijakan dimana transparansi kepada masyarakat kurang terbuka dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kata kunci: Efektivitas, Alokasi Dana Desa (ADD), Masyarakat, Pemberdayaan

Abstract

The Village Fund Allocation (ADD) is a fund provided by the district/city government in physical or non-physical development to the village. Non-physical Village Fund Allocation (ADD) is in the form of community empowerment with the aim of prospering both in terms of the economy or improving the quality of human resources who were initially less prosperous to become prosperous and able to develop in human resources. Kacaribu Village has community empowerment programs, namely programs that use Village Fund Allocations including planned programs such as direct assistance to toddlers and the elderly, mutual assistance activities, Youth Organization Training and Customs Training in Kacaribu Village. The method used is descriptive qualitative research method, in Community Empowerment in Kacaribu Village has not been effective in terms of achieving the goals, namely transparency and policy targets where transparency to the community is less open and people who should receive assistance do not receive the assistance.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Allocation (ADD), Community, Empowerment*

PENDAHULUAN

Suatu negara pada dasarnya memiliki permasalahan yang kompleks, seperti ekonomi, sosial dan politik, begitu pula di Negara Republik Indonesia kerap sekali permasalahan itu dilekatkan pada persoalan pemerintah pusat dan daerah mengenai ketidakadilan dan kesenjangan fiskal tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu lahirnya satu kebijakan resmi untuk menjawab persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang menciptakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan pajak, sementara daerah mempunyai kekuatan yang lebih besar. Alokasi dana desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari alokasi dana desa adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana belanja keperluan desa untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi supaya tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Penggunaan dana Desa membantu dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Celah penyimpangan dana kegiatan yang sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Namun, di samping manfaatnya sebagai sumber penganggaran pembangunan, pemanfaatan dana desa dalam proses pembangunan daerah pedesaan masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya warga masyarakat tidak memperoleh informasi secara transparan tentang bagaimana keuangan dikelola, dan seberapa besar Keuangan Desa diperoleh dan dibelanjakan, Hal ini juga dialami oleh pemerintah Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kacaribu, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu beberapa program Pemberdayaan Masyarakat seperti sosialisasi bahaya narkoba dan bantuan langsung kepada lansia dan balita. Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kacaribu tidak nampak adanya perubahan dari masyarakat di desa tersebut.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola dana desa menjadi masalah dikarenakan berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilakukan BPS, ada lebih dari 11.000 kepala desa yang hanya berpendidikan SMP ke bawah. Jumlah tersebut hampir setara dengan 15 persen dari jumlah seluruh kepala desa yang ada di Indonesia. Jika tiap desa diasumsikan mendapat dana desa

sebesar 1 miliar, hal itu berarti lebih dari 11 triliun dana desa yang dikucurkan pemerintah dikelola oleh SDM yang memiliki latar belakang pendidikan SMP kebawah. Bahkan, dalam laporan Podes juga diungkapkan lebih dari 1000 kepala desa di Indonesia belum pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Melihat fakta yang ada, wajarapabila masih banyak ditemukan desa yang meskipun telah mengelola dana desa yang sangat besar namun belum berdampak secara signifikan terhadap pembangunan di wilayahnya.

Desa Kacaribu merupakan salah satu desa di Kabupaten Karo yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan stimulan bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Desa Kacaribu sebagai salah satu daerah yang menerima alokasi dana desa, Pemerintah Kabupaten Karo telah menetapkan empat Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, serta Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa sebagai regulator dan pengawas penggunaan dana desa.

TEORI

2.1 EFEKTIVITAS

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dalam administrasi negara adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif (Ravianto 2014 : 11). Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni 2016 : 69).

2.2 DIMENSI EFEKTIVITAS

menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985 : 53) dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

3. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif melakukan aktivitasnya untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek penelitian dan latar soal penelitian. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan tersebut akan berbentuk cerita mendetail (deskripsi-rinci, gambaran yang mendalam), termasuk ungkapan – ungkapan asli subjek penelitian (Hamidi. 2005:3).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan suatu data dan fakta yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan bahwa teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Richard M. Steers (1985:53). Teori Richard tersebut merujuk identifikasi masalah dan dijelaskan bahwa dalam melihat efektivitas dari organisasi diperlukan beberapa indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

4.1. Pencapaian Tujuan

Menurut Steers (1985 : 53) mengatakan pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, Yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Dengan adanya pencapaian tujuan yang ingin dituju desa Kacaribu pada Pemberdayaan Masyarakat

di Desa tersebut. Seperti pendataan peserta pemberdayaan masyarakat, sosialisasi pemberdayaan masyarakat Bantuan Langsung Kepada Balita dan Lansia (BLT) di Desa Kacaribu.

4.2 Integrasi

Menurut Steers (1985 : 53) integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan pemerintahan desa Kacaribu untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi ini terdiri dari beberapa faktor yaitu prosedur dan proses sosialisasi. Peneliti mengukur efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu dengan menggunakan faktor prosedur yang digunakan dan proses sosialisasi.

4.3 Adaptasi

Menurut Steers (1985 : 53) adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan pemerintahan desa Kacaribu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana. Berdasarkan faktor yang telah disebutkan, peneliti bermaksud menggunakannya sebagai tolak ukur Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu. Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu dikatakan efektif jika terjadi peningkatan kemampuan, dalam penelitian ini berarti peningkatan kehidupan masyarakat yang dari awalnya kurang sejahtera menjadi sejahtera, seperti program bantuan langsung kepada balita dan lansia yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dan program gotong-royong karang taruna yang diadakan di desa Kacaribu. Program tersebut seharusnya dapat mengentaskan stunting dan juga keamanan di desa Kacaribu. Sedangkan tolak ukur lain adalah adanya sarana dan prasarana yang mendukung program bantuan langsung kepada balita dan lansia dan gotong-royong karang taruna, seperti perangkat desa yang mensensus masyarakat yang tidak mampu dan juga pemuda masyarakat yang memahami bagaimana menjaga desa tersebut.

4.4 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan,

dan kemampuan kultur serta politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*) (Suharto : 2005).

4.4.1 Akses

Menurut Indrawati (2017 : 863) arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan. Akses terhadap kebutuhan informasi diakui sebagai hak dasar bagi setiap orang Namun pada masyarakat terdapat kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses yang lebih terhadap informasi dan masyarakat yang kurang mempunyai akses informasi. Masyarakat yang miskin informasi sulit mendapatkan akses informasi karena perbedaan kemampuan ekonomi, sedangkan masyarakat yang kaya mudah mendapatkan informasi. Kesenjangan terjadi karena masyarakat sulit mendapatkan sumber informasi. Selain kemampuan ekonomi adalah masalah kesadaran pentingnya informasi, mengajarkan orang untuk mencari informasi secara sistematis dan mendorong penyediaan informasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya lapisan sosial dimasyarakat.

4.4.2 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggungjawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Syamsuddin dalam Prasetya (2008 : 54).

4.4.3 Kontrol

Menurut Azhar Susanto (2008 : 95) pengendalian (*control*) meliputi semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.

4.4.4 Manfaat

Kemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna. Manfaat adalah bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan Indrawati (2017 : 863).

5. KESIMPULAN

Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana dalam proses Alokasi Dana Desa ada tiga tahap yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksana Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang tersebut partisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Kacaribu kepada masyarakat Desa Kacaribu. Tahapan Pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Efektivitas Alokasi Dana Desa yang dilakukan Di Desa Kacaribu masih Kurang efektif. Pada Tahapan Pertanggungjawaban dalam proses Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kacaribu masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Kacaribu serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Kacaribu. Hal ini karena proses yang ada dalam setiap tahapan Efektivitas Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip efektivitas dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim Evaluasi dari setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

6. SARAN

Sebagai Pemerintah Desa Kacaribu Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dalam proses Efektivitas Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat desa Kacaribu kepada masyarakat Desa Kacaribu. Kemudian pada tahap pelaksanaan diperlukan aparat Pemerintah Desa Kacaribu melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa sesuai yang diharapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Kacaribu sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap tahapan proses Efektivitas Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Suharto, Edi.-(2005). membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika Aditama.
- Ravianto. J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran. Jakarta: Binaman Aksara.
- Beni, Peki. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.
- Steers, Richard, (1985). Efektivitas organisasi. Jakarta: Airlangga
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Azhar Susanto. (2008). Sistem informasi Akuntansi, Bandung , Lingga jaya.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kuangan Desa
- Pemendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengalokasian Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yaitu Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa

SUMBER INTERNET

- Habib hanafi, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB terhadap Sikap Pengguna dengan Pendekatan TAM”, Artikel diakses pada tanggal 26 Juli 2022 dari <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>.